

**PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM
PEMERINTAH DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

Yuni Lisdawati
NPP. 29.0301

*Asdaf Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: yunilisda16@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the low participation of the community and the government regional devices whose managers of social media are limited. **Purpose:** This study aims to know the use of social media in the dissemination of government program information in the Department Of Statistical Information Communication And Cryptography Rokan Hilir regency of Riau Province. **Method:** This study uses qualitative research design descriptive methods and inductive approaches with analysis of the uses and gratifications theory by Lometti, Reeves, Bybee and the theory of open government by OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). The technique of collecting data are done by observation, interviews and documentation. **Result:** The findings are the use of social media in the dissemination of government program information has not been said well based on the dimensions of the amount of time social media use is still relatively lacking, the dimensions of media content, transparency and accountability are low despite the dimensions of media relations with individuals public involvement in the fairly good category. **Conclusion:** The use of social media in disseminating information on government programs at the Office of Communication, Informatics, Statistics and Cryptography, Rokan Hilir Regency, Riau Province is still not good, this is due to lack of apparatus resources, lack of providing information to the public about official social media and limited service infrastructure. In order to increase the use of social media in disseminating information, it is recommended to improve the quality and quantity of the apparatus, improve infrastructure and collaborate with other parties.

Keywords: Information, Social Media, Usage

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat serta perangkat daerah pengelola media sosial yang terbatas. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan

Hilir Provinsi Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif metode deskriptif dan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori kegunaan dan kepuasan oleh Lometti, Reeves, Bybee serta teori pemerintahan terbuka dari OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi program pemerintah belum dikatakan baik, berdasarkan dimensi jumlah waktu penggunaan media sosial masih tergolong kurang, dimensi isi media, transparansi dan akuntabilitas termasuk rendah meskipun dimensi hubungan media dengan individu keterlibatan publik dalam kategori cukup baik. **Kesimpulan:** Penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi program pemerintah di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau masih belum baik, hal ini dikarenakan adanya sumber daya aparatur yang kurang, kurangnya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai media sosial yang resmi serta keterbatasan sarana prasarana dinas. Guna meningkatkan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi, disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, peningkatan sarana prasarana serta melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Kata kunci: Informasi, Media Sosial, Penggunaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanannya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi dasar pemerintah dalam penyebarluasan informasi karena pemberian atau penyampaian informasi dari pemerintah merupakan bagian pelayanan publik kepada masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang harus dilakukan dan menjadi perhatian pemerintah. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi faktor pendukung untuk masyarakat dapat menerima informasi dari pemerintah secara luas dan terbuka. Pemerintah provinsi Riau juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi dan Keterbukaan untuk menjamin adanya keterbukaan penyelenggaraan pelayanan dari pemerintah daerah provinsi dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem pemerintahan. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi hal tersebut diatur lebih lanjut mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kinerjanya melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir. Perkembangan teknologi informasi komunikasi mendukung terciptanya beberapa perubahan signifikan dalam bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan sudah menggunakan cara-cara yang baru yang lebih dapat menjangkau seluruh masyarakat sejalan dengan globalisasi. Perubahan tersebut mengarah kepada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menjamin adanya interaksi lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Tentu penyebarluasan informasi mengenai segala sesuatu yang dilakukan pemerintah dapat lebih dioptimalkan dengan adanya perkembangan dan

perubahan yang ada. Pemanfaatan internet dalam setiap aktivitas menjadi tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah mengalami dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dapat dilihat secara nyata dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi yang terus diupayakan sebaik mungkin. Saat ini kebutuhan masyarakat akan informasi terus meningkat mengingat angka penggunaan internet di Indonesia juga meningkat. Apabila di tahun 2018 sebesar 64,8 persen penduduk menggunakan internet, maka di tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 8,9 (delapan koma sembilan) persen menjadi 73,7 persen. Persentase tersebut hampir setara dengan tiga perempat dari jumlah seluruh populasi penduduk Indonesia yakni 196,7 juta penduduk menurut Badan Pusat Statistik. Dan provinsi Riau termasuk dalam 15 provinsi terbesar penggunaan internet perindividu yang setiap tahunnya meningkat. Ada banyak media ataupun platform yang saat ini digunakan pemerintah, salah satunya media sosial. Media sosial menjadi media pendukung yang dapat mendorong pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2017, disebutkan penggunaan akses internet untuk media sosial menduduki peringkat kedua di Indonesia. Pemerintah daerah provinsi Riau dan juga pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir yang sudah menggunakan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dari pemerintah untuk mencapai kepuasan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi program pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Melalui data media sosial resmi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan yang sangat besar antara jumlah pengikut ketiga media sosial yang aktif digunakan apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk kabupaten. Apalagi jika dilihat dari data yang menunjukkan provinsi Riau termasuk daerah yang memiliki angka penggunaan internet cukup tinggi. Masyarakat selaku pengguna media sosial meskipun sudah digabungkan jumlah pengikut ketiganya masih belum mencapai 1% dari total penduduk yang mencapai sekitar 637.161 jiwa. Partisipasi dari masyarakatlah yang menjadi penggerak adanya penyebarluasan informasi dari pemerintah melalui media sosial yang digunakan. Selain itu berdasarkan hasil laporan yang dibuat oleh salah satu pegawai yang saat ini bekerja di kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rokan Hilir dikarenakan organisasi perangkat daerah ini masih baru berdiri pada tahun 2019 masih terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatannya. Keterbatasan yang paling dirasakan adalah dalam jumlah pegawai yang secara langsung dapat mempengaruhi tugas dan fungsi kerja dinas. Hal ini khususnya dirasakan sangat berpengaruh dalam hal pembaruan informasi untuk *update* isi konten media sosial yang ada. Seringkali terjadi keterlambatan dikarenakan hanya ada seorang pegawai sendiri yang harus mencari data di lapangan secara langsung, jadi pengolahan data menjadi informasi dapat dilakukan setelah kegiatan di lapangan selesai. Belum lagi untuk memposting informasi agar dapat memudahkan masyarakat membacanya memerlukan kemampuan lain khususnya penggunaan aplikasi komputer yang selama ini hanya dikerjakan oleh satu orang pegawai saja (Simatupang, 2021). Media sosial yang digunakan dan dimanfaatkan secara tepat guna sesuai sasaran akan dapat menjadi sarana atau perantara yang ideal untuk penyebarluasan informasi khususnya program-program pemerintah daerah kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Heri Juanda yang berjudul *Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh* (Juanda, 2017), menemukan bahwa informasi dapat tersebar dengan baik kepada masyarakat melalui media sosial sebagai hasil kemajuan teknologi, hanya saja interaksi pemerintah dengan masyarakat masih kurang terbangun. Pengelola akun media sosial Humas Aceh kurang dapat menciptakan atau membangun interaksi yang intens dengan masyarakat pengguna media sosial. Hal ini terlihat dari komentar yang tidak dibalas serta tanggapan reaksi yang tidak direspon. Penelitian Evi Novianti, Aat Ruchiyat, Lukiat Komalasari, Kokom Komariah dan Diah Sri Rejeki yang berjudul *Pemanfaatan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran)* (Novianti et al., 2020), menemukan bahwa media sosial yang digunakan dalam penyebarluasan informasi program pemerintah memberikan hasil efektif karena jumlah interaksi dengan masyarakat terbukti banyak terbukti melalui kolom komentar, khususnya dalam akun instagram yang paling disenangi masyarakat. Karena di lingkungan Sekda Kabupaten Pangandaran semua generasi sudah aktif memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Penelitian Mawarni yang berjudul *Peran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir dalam Publikasi Informasi Publik Tahun 2016-2017* (Mawarni, 2020) menemukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Provinsi Riau dalam melaksanakan peran sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator informasi kurang berjalan dengan baik karena terdapat kendala dalam hal ketidaksiapan Bagian Humas dan Protokol dalam pengelolaan media yang digunakan dan ketidakterediaan sumberdaya sarana lainnya. Akibatnya penyediaan informasi tidak mampu memenuhi permintaan dari masyarakat yang ada.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya masih belum menunjukkan secara langsung aktivitas dinamika penggunaan media sosialnya hanya terbatas menunjukkan jumlah *followers* dan postingan yang diunggah, hal ini akhirnya membuat perkembangan penggunaan media sosial lebih sulit untuk diamati sesuai dengan kondisi. Dalam penelitian yang dilakukan, dengan adanya perbedaan teknik pengumpulan data Penulis menambahkan informasi mengenai *tracking* penggunaan media sosial yang ada secara lebih lengkap. Sehingga akan dapat diketahui pula bagaimana hubungan komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan pemerintah selama ini. Dalam penelitian sebelumnya teori yang digunakan adalah teori kebutuhan informasi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Penulis digunakan teori *uses and gratifications* yang di dalamnya sudah mencakup kebutuhan informasi yang lebih dititikberatkan kepada penilaian kepuasan masyarakat selaku pengguna media sosial serta menggunakan teori pemerintahan terbuka sebagai acuan untuk meninjau bagaimana penggunaan media sosial berpengaruh terhadap pemerintahan. Secara tidak langsung, dengan teori penelitian yang berbeda penelitian yang dilakukan menjadi lanjutan lebih dalam mengenai penggunaan media sosial oleh pemerintah serta akan dapat melihat sebesar apa pengaruh yang diberikan terhadap masyarakat. Dengan metode yang lain dibandingkan pada saat penelitian sebelumnya dapat dilihat pula di titik atau bagian mana seharusnya dapat diatasi dan

ditingkatkan oleh pemerintah daerah sekalipun masih berada dalam satu provinsi yang sama pasti akan ditemukan faktor-faktor atau hal berpengaruh lainnya yang berbeda dari sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi program pemerintah di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau serta faktor yang menjadi penghambat dan upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui proses Data Condensation, Data Display serta Drawing and Verifying Conclusions baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Dalam tipe menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014,21) ini menjelaskan bahwa Peneliti perlu melakukan penyaringan data terlebih dulu untuk memilih yang sesuai dengan penelitian, lalu dilakukan penyajian data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dilihat hubungannya dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan atas jawaban dari penelitian yang dilakukan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Seksi Komunikasi Informasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Seksi Diseminasi Informasi, Kepala Seksi Multimedia dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, Pegawai Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat selaku pengguna media sosial. Adapun pengumpulan data kuantitatif dilaksanakan observasi secara langsung di lapangan serta dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan teori kegunaan dan kepuasan serta teori pemerintahan terbuka yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu jumlah waktu penggunaan media sosial; isi media, transparansi dan akuntabilitas; serta dimensi hubungan media dengan individu keterlibatan publik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

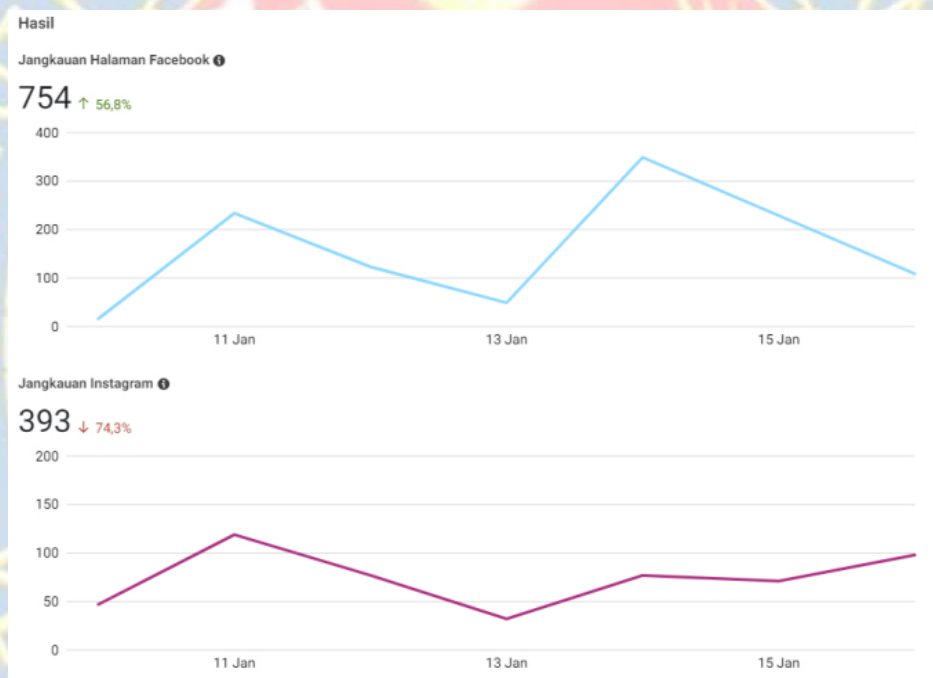
Penulis menganalisis penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi program pemerintah di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau menggunakan pendapat dari Guy E. Lometti, Byron Reeves dan Carl R. Bybee di dalam buku Humaizi (2018,42) serta badan OECD yang menyatakan bahwa kegunaan media sosial dapat dinilai berdasarkan kepuasan masyarakat yang menggunakannya serta pemerintahan yang terbuka dapat diwujudkan apabila masyarakat sudah merasakan bahwa ada keikutsertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai media yang dapat diakses siapa saja. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Jumlah Waktu Penggunaan Media Sosial

Penulis melakukan pengukuran terhadap jumlah waktu dalam penggunaan media sosial dengan memperhatikan beberapa indikator yaitu intensitas penggunaan media durasi penggunaan media. Frekuensi penggunaan media menilai masyarakat selaku pengguna media sosial dan juga Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau selaku

pengelola dan pengguna media sosial yang dilihat selama beberapa waktu atau periode dalam masa penelitian. Masyarakat selaku pengguna mengakses program pemerintah melalui media sosial khususnya YouTube tidak dilakukan setiap hari namun hanya sesekali saja. Terlihat dari angka banyak penayangannya. Melalui hasil pemantauan sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai 16 Januari 2022 atau kurang lebih hampir satu bulan, menunjukkan bahwa hanya ada 13 hari di mana masyarakat ada mengakses salah satu dari 5 video YouTube yang diamati. Dari antara waktu tersebut hanya ada 1 hari di mana masyarakat mengakses kelima video yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 sebanyak 7 kali penayangan. Selanjutnya akses salah satu video terlihat pada tanggal 21 dan 22 Desember 2021 serta 04, 08, 10, 11 dan 14 Januari 2021. Untuk akses tayangan 2 video ditunjukkan pada tanggal 23, 27 dan 30 Desember 2021 serta tanggal 15 Januari 2022. Selebihnya menunjukkan tidak adanya tayangan atau 0. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa frekuensi masyarakat dalam menggunakan media sosial untuk mengakses informasi program pemerintah masih sangat kurang.

Jangkauan Media Sosial Facebook dan Instagram



Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir 2022

Melalui gambar di atas dapat dilihat perbedaan dalam hal perbandingan intensitas penggunaan dari antara media sosial Facebook dan Instagram. Meskipun media sosial Facebook dengan Instagram dibuat *autopost*, yang mana ketika dibuatkan postingan di Instagram secara langsung akan masuk pula postingan baru di Facebook, ternyata masih terdapat perbedaan intensitas di antara keduanya. Facebook jangkauan intensitasnya mencapai 754 sedangkan Instagram mencapai 393 kali. Dalam hal intensitas penggunaan media sosial dapat terlihat masyarakat pengikut sudah cukup sering membuka dan mengakses media sosial Facebook dan Instagram. Untuk durasi penggunaan tidak ada batasan baik dari pemerintah dalam hal ini dinas dan juga masyarakat. Dinas mengakses media sosial setiap jam kerja karena harus selalu dalam pantauan selama bekerja di kantor dan masyarakat mengakses media sosial di mana saja dan kapan saja. Penulis menyimpulkan pengukuran terhadap jumlah waktu dalam penggunaan media sosial masih sangat minim.

3.2 Isi Media, Transparansi dan Akuntabilitas

Penulis melakukan pengukuran terhadap isi media, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan media sosial dengan memperhatikan beberapa indikator yaitu media sosial yang digunakan & aksesibilitas informasi, cara penggunaan media sosial & keterbukaan proses kinerja serta informasi dalam media sosial & kelengkapan informasi yang didapatkan sejak adanya keberadaan dari media sosial Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Perkembangan Media Sosial Terbaru 2022

Jenis Media Sosial	Akun Resmi Media Sosial	Jumlah Pengikut Sebelumnya (jiwa)	Jumlah Pengikut Terbaru (jiwa)
YouTube	Kominfo Rohil TV	15	151
Facebook	Kominfo Rohil	2959	3085
Instagram	Kominforohil	661	919

Sumber : Diolah Peneliti, 2022

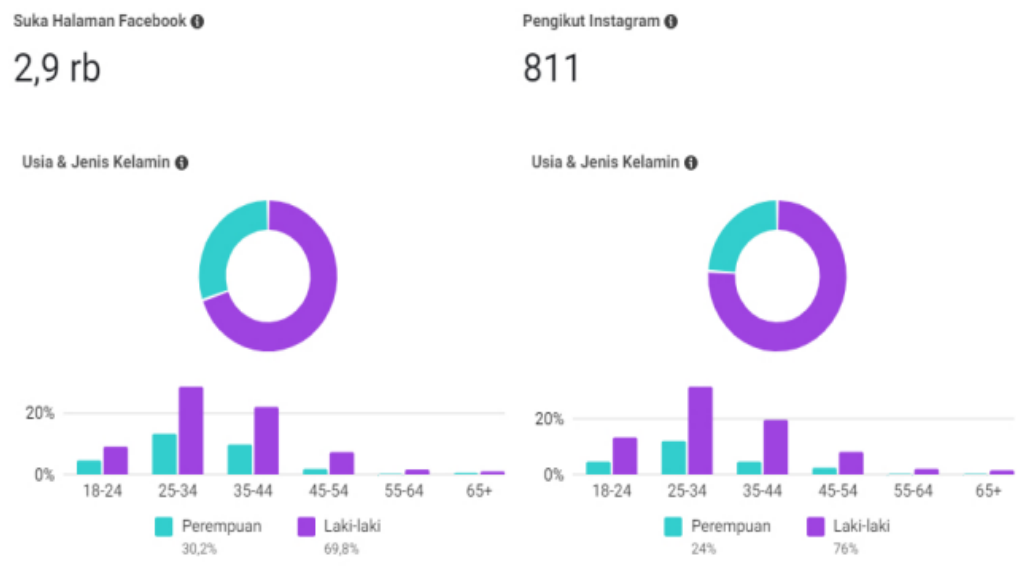
Saat ini media sosial yang dimiliki dan digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube sudah digunakan secara aktif dan siapapun dapat mengakses informasi dari dalamnya. Cara penggunaannya terlihat dari media sosial dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan memanfaatkan semua fitur yang ada di dalam media sosial. Dan juga untuk proses kinerja sudah dilakukan secara terbuka berdasarkan fungsi tugas yang diberikan secara tepat, terbukti dengan hanya satu bidang dan 3 seksi di dalamnya yang menangani urusan media sosial dan informasi. Media sosial saat ini menjadi sumber terpercaya yang efektif untuk mendapatkan informasi secara resmi dari pemerintah karena data yang ditampilkan sudah mendukung dan lengkap. Informasi mengenai berbagai program pemerintah dan juga kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan urusan daerah.

3.3 Hubungan Media Sosial dengan Individu dan Keterlibatan Publik

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi hubungan media sosial dengan individu dan keterlibatan publik dalam penggunaan media sosial dengan memperhatikan beberapa indikator yaitu partisipasi pengguna media & komunikasi dua arah, pengaruh antara media dengan pengguna & mekanisme pengawasan pertanggungjawaban serta dampak penggunaan media & kepuasan masyarakat karena dimensi ini akan membuktikan apa yang diperoleh dan dirasakan oleh masyarakat selama ini. Melalui gambar di bawah ini dapat terlihat bahwa tercipta partisipasi yang cukup dari masyarakat berdasarkan kondisi demografis yang ada khususnya melalui media sosial Facebook. Sebanyak 2900 atau hampir tiga ribu orang pada saat dilakukan penghitungan data menjadi pengikut yang aktif ataupun penyuka halaman Facebook, sedangkan untuk media sosial Instagram masyarakat yang mengikutinya terdapat 811 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa yang lebih aktif menggunakan media sosial di kabupaten Rokan Hilir saat ini adalah penduduk usia kalangan muda. Penduduk kelompok usia ini lebih melek terhadap berbagai informasi program pemerintah yang

disebarluaskan sehingga komunikasi dua arah cukup terbentuk antara pemerintah dan masyarakat melalui media sosial.

Distribusi Pengguna Media Sosial Dinas Facebook dan Instagram



Sumber : Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Media sosial memberi manfaat yang cukup dirasakan masyarakat karena masyarakat banyak mengetahui kegiatan dan program pemerintah melaluinya, terlebih seperti kegiatan vaksinasi ataupun kegiatan pemberian bantuan dari pemerintah. Sedangkan untuk mekanisme pengawasan pertanggungjawaban sudah ada dilakukan meskipun terbatas karena hanya dilakukan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas yang dalam masa kepemimpinan ini hanya dipegang oleh 1 orang pejabat sebagai Pelaksana Tugas. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya media sosial Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sudah cukup puas dengan keberadaannya dan sudah merasakan bahwa kehadiran media sosial di tengah pemerintahan saat ini memiliki dampak positif namun bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya media sosial Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau kurang merasakan adanya dampak dan kepuasan karena sulit meminta timbal balik (*feedback*) apabila tidak terjangkau sama sekali. Penulis menyimpulkan pengukuran terhadap hubungan media sosial dengan individu dan keterlibatan publik dalam penggunaan media sosial tergolong cukup.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Untuk melaksanakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien pemerintah daerah dapat melakukan berbagai usaha yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, termasuk dalam hal memberikan pelayanan yang di dalamnya mencakup program ataupun kebijakan yang disesuaikan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, menempati posisi sebagai unsur pemerintah daerah yang bertugas memfasilitasi masyarakat dalam memberikan informasi program pemerintah salah satunya melalui media sosial. Penulis menemukan temuan penting yakni generasi muda berperan cukup besar dalam penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Penggunaan media sosial digerakkan lebih banyak oleh penduduk berusia belasan hingga dua puluhan tahun. Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi

program pemerintah belum dikatakan baik, karena masih harus dilakukan pengoptimalan lebih lanjut dari pemerintah. Sama halnya dengan temuan Evi Novianti, Aat Ruchiyat, Lukiati Komalasari, Kokom Komariah dan Diah Sri Rejeki bahwa generasi milenial dan generasi lebih tua harus saling berkolaborasi untuk belajar melek teknologi komunikasi dan informasi agar penggunaan media sosial semakin optimal. Masyarakat yang menggunakan media sosial secara aktif saja tentu saja akan mengetahui informasi mengenai kegiatan dan program pemerintah yang secara tidak langsung akan menjadikan masyarakat selalu *update*. Namun layaknya hal lain, penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi masih menemui beberapa hambatan yang menjadi kekurangan, diantaranya adalah sumber daya aparatur yang kurang, kurangnya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai media sosial yang resmi serta keterbatasan sarana prasarana dinas. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Mawarni yang juga menemukan faktor penghambat tersebut memang umum sering dijumpai menjadi kendala yang harus diatasi bersama dan bukanlah hal yang tidak mungkin unyuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi pemerintahan. Sebagai upaya pemerintah dapat melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, peningkatan sarana prasarana serta melakukan kerjasama dengan pihak lain. Masyarakat juga memerlukan interaksi yang lebih intens dengan pemerintah. Di masa konvensional sebelum teknologi ada seperti sekarang ketika masyarakat datang ke kantor pemerintah dan bertanya barulah akan diberikan penjelasan dan bisa berbincang langsung. Hal itu menjadi tantangan karena seringkali informasi program pemerintah banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat. Terutama ketika ada program pemerintah yang keberlangsungannya hanya sebentar. Layaknya temuan Heri Juanda media sosial yang digunakan pemerintah harus selalu dilihat respon masyarakatnya dan sebisa mungkin dijawab apabila pengelola membuka media sosial terkait. Sehingga secara tidak langsung juga tercipta saling keterkaitan dan keterikatan yang saling membutuhkan antara pemerintah dan masyarakat. Karena masyarakat seringkali hanya butuh didengar terlebih dahulu suaranya oleh pemerintah yang berwenang agar merasa diperhatikan juga.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan fakta bahwa media sosial saat ini menjadi sarana pemerintah untuk dapat menunjukkan gambaran atau citra pemerintah. Dari satu sisi dapat dilihat bahwa pandangan masyarakat yang selama ini mungkin masih kurang baik dikarenakan menjumpai oknum pemerintah yang menyalahi aturan dapat berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik dikarenakan ada bukti bahwa pemerintah juga banyak yang masih tetap amanah dan menjalankan tugasnya dengan baik seperti yang ditunjukkan melalui media sosial. Dari sisi lainnya dapat diambil pemikiran bahwa pemerintah harus selalu melakukan hal terbaik dalam menjalankan semua kegiatan dan program pemerintahan apalagi jika hal tersebut ditujukan kepada masyarakat karena saat ini masyarakat dapat langsung mengkritisi melalui media sosial apabila ada hal yang tidak sesuai yang dijumpainya. Pada intinya citra pemerintah dalam media sosial harus sesuai dengan kenyataan langsung di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi program pemerintah di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau masih belum baik, hal ini dikarenakan masih ditemukan faktor penghambat yang menjadi kekurangan yaitu adanya sumber daya aparatur yang kurang, kurangnya pemberian informasi kepada masyarakat mengenai media sosial yang resmi serta keterbatasan sarana prasarana dinas. Guna meningkatkan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi, disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, peningkatan sarana prasarana serta melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan jarak tempat penelitian dikarenakan sejak awal dimulai masa pra penelitian Penulis harus segera melakukan studi literatur dan mencari informasi mengenai topik penelitian padahal sedang tidak berada di daerah secara langsung sehingga cukup menemui tantangan yang besar. Selain itu keterbatasan juga ditemui dari bagian biaya penelitian. Untuk mengakomodir jalannya penelitian diperlukan biaya yang harus disediakan sendiri oleh Peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan selama beberapa hari sesuai jadwal penelitian. Cakupan penelitian juga dirasa masih kecil dan sempit untuk menggambarkan keseluruhan kondisi nyata di dalam masyarakat karena penelitian hanya dilakukan dengan melibatkan beberapa orang sampel atas keseluruhan penduduk kabupaten Rokan Hilir di provinsi Riau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih awal di masa baru dibuatnya media sosial Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Oleh karena itu Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di masa waktu mendatang pada lokasi serupa berkaitan penggunaan media sosial dalam penyebarluasan informasi program pemerintah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Selain itu dalam beberapa waktu kedepan juga pasti akan banyak perubahan terjadi dalam perkembangan media sosial, masyarakat pun pasti akan ikut menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada diharapkan pemerintah dalam hal ini dinas yang bersangkutan juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri beserta Bapak/Ibu Pimpinan dalam jajarannya dan seluruh civitas akademika yang meliputi Dosen Pengajar Pelatih Pengasuh dan pihak lainnya yang belum disebutkan di kampus pusat dan kampus daerah yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi Penulis untuk melaksanakan penelitian, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terutama seluruh pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian, seluruh senior rekan dan junior yang selalu ada dan membantu saat dibutuhkan serta seluruh pihak yang turut andil selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Humaizi, M., 2018. *Uses and Gratifications Theory*. Medan: USU (Universitas Sumatera Utara) Press.
- Saldana, J., Huberman, A. M., dan Miles, M.B., 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Third Edition). Los Angeles: SAGE Publications Inc.
- Juanda, Heri. 2017. "*Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh*.", Jurnal Peurawi Media Kajian Komunikasi Islam Vol. 1(1), 1-22. Banda Aceh. UIN Negeri Ar-Raniry.
- Mawarni. 2020. "*Peran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Indragiri Hilir dalam Publikasi Informasi Publik Tahun 2016-2017*.", JOM FISIP Vol. 7(1), 1–15. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., Komariah, K., Rejeki, D. S., 2020. "*Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran)*", AL MUNIR Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 11(1), 48–59. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Simatupang, E. 2021. *Pemanfaatan Media Sosial Facebook Dan Instagram Sebagai Sarana Penyampaian Pesan Diskominfo Rokan Hilir*, Laporan Kerja Praktik. Tangerang: Universitas Surya.